

KORUPSI

Oleh Nurcholish Madjid

Gunnar Myrdal, seorang ahli ekonomi Swedia pemenang hadiah Nobel, memasukkan negeri kita, Indonesia, ke dalam kelompok negeri-negeri berkembang, yang ia sebut sebagai kelompok “negara-negara lunak” (*soft states*). Sebutan itu kurang enak didengar, dan pernah menjadi bahan kontroversi. Tetapi tak ada salahnya untuk menelaah kembali maksud penilaian Myrdal itu sebagai cermin bagi kita, dan meneliti kenyataan-kenyataan yang ada.

Yang dimaksud Myrdal sebagai “lunak” itu ialah tidak adanya disiplin sosial. Di sini kita membicarakan mengenai kelemahan dan kesewenangan yang bisa, dan malah memang telah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, sosial, politik. Kesempatan penyalahgunaan dalam ukuran besar itu terbuka untuk kelas atasan, tetapi orang dari anak tangga paling bawah pun sering mendapatkan pula kesempatan itu untuk keuntungan-keuntungan kecil. Myrdal menyebut gejala ini sebagai “korupsi”, yang telah begitu mengakar dalam budaya bangsa kita.

Jika benar bahwa untuk setiap keberhasilan tentu ada ongkosnya, maka sebagai salah satu “ongkos” menjadi bangsa merdeka ialah menggantikan tenaga-tenaga penjajah dengan tenaga-tenaga sendiri dalam mengatur negeri, dan itu juga berarti pergantian tenaga ahli dan berpengalaman oleh yang kurang ahli dan kurang berpengalaman. Keadaan kurang ahli dan tiadanya pengalaman itu mempunyai akibat kepada mundurnya produktivitas. Mundurnya produktivitas

berjalan seiring dengan membengkaknya personalia, dan ini, pada urutannya, diiringi dengan turunnya gaji bila dikukur dari nilai rilnya. Digabung dengan kebiasaan menjalankan administrasi “menurut kebijaksanaan”, dan ditambah dengan kaum politisi yang setelah kemerdekaan berkedudukan penting karena memegang kekuasaan, rendahnya gaji pegawai negeri dalam nilai rilnya ikut membuka pintu bagi praktik-praktik korupsi. Myrdal secara khusus menyebut negeri kita Indonesia, yang disebutnya bebas dari korupsi di zaman kolonial Belanda, tetapi kemudian menjadi negeri yang paling korup beberapa lama setelah kemerdekaan.

Efek paling buruk meningkatnya korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan masyarakat luas, serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi elemen tak rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana (misalnya pembangunan) dengan meyimipangkan rencana itu.

Karena sudah sedemikian kompleksnya kenyataan tentang korupsi itu, dan sedemikian rusaknya dampak-dampak yang dihasilkannya, maka menurut Myrdal, tidak ada jalan bagi usaha memberantas korupsi selain daripada kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin. Kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin itu harus berjalan seiring dan bersama-sama. Tanpa keteladanan, apa pun seruan dan tindakan seorang pemimpin akan tidak pernah berwibawa, karena tidak otentik. Sebaliknya, dengan hanya keteladanan saja, tanpa kemauan politik yang kuat, kepemimpinan seorang pemimpin tidak akan efektif. Maka dari itu, menurut Myrdal, orang menyalahkan Nehru berkenaan dengan pesatnya korupsi di India. Meskipun Nehru mempunyai keteladanan — karena ia adalah benar-benar seorang pemimpin yang bersih dan patriotik — namun ia tidak bersedia menindak tegas korupsi yang diketahuinya sendiri merajalela di negerinya.

Alasannya ialah, karena dengan meneriakkan adanya korupsi itu keras-keras, maka masyarakat dikesankan secara salah sebagai hidup dalam alam korupsi, sehingga mungkin justru mendorong

keberanian orang banyak untuk melakukan korupsi sendiri. Mungkin Nehru benar, tetapi keengganannya untuk menggunakan wibawa pribadinya yang hebat itu, dan memenuhi tuntutan umum untuk dengan tegas memberantas korupsi di tingkat atas, sebagaimana dikatakan oleh banyak kawan terdekatnya sendiri, adalah kesalahan Nehru yang serius.

Berbeda dengan Nehru ialah Rajaratnam dari Singapura. Republik pulau ini dinilai Myrdal sebagai satu-satunya dari kalangan negeri-negeri di Asia Selatan dan Tenggara, jika bukan negeri-negeri berkembang, yang relatif bebas dari korupsi dan tidak termasuk negara lunak. Myrdal melihatnya sebagai antara lain berkat tipe kepemimpinan Rajaratnam, salah seorang tokoh politik.

Ada pendapat sementara para ahli yang mengatakan bahwa korupsi adalah suatu sistem politik, yang bisa diarahkan oleh mereka yang berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa ditenggang. Maka berkat kemauan politik yang keras, pemimpin seperti Rajaratnam itu dalam memberantas korupsi ditambah dengan keteladanan diri dan keluarganya yang bersih, maka Singapura akhirnya berhasil memiliki pemerintahan yang bersih, yang kemudian mempertinggi semangat rakyatnya untuk membangun. Sebab salah satu dampak positif adanya pemerintahan yang bersih ialah pemerataan beban tanggung jawab dan rasa keadilan, yang selanjutnya mempertinggi rasa ikut punya rakyat terhadap negara dan pernerintahan.

Jika untuk memberantas korupsi yang membawa demoralisasi itu diperlukan kemauan politik yang kuat serta keteladanan pemimpin, maka secara langsung tersangkut pula masalah etika. Tekad memberantas korupsi dan keteguhan hati sendiri untuk tidak korup adalah problem etika. Sebab di dalamnya tersirat proses mencari dan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, sikap itu melibatkan “pola kehidupan yang tindakan itu sendiri merupakan bagiannya”. Sehingga ketentuan ini akan membawa kepada pernyataan etis, “Jika Anda tidak mau memberantas korupsi, apakah Anda sebenarnya setuju dengan korupsi? Dan

jika Anda setuju dengan korupsi, maka apakah tidak berarti Anda setuju dengan suatu pola hidup yang menyeluruh yang di situ korupsi merupakan bagian, dan meliputi pula penipuan, merusak kepercayaan orang, dan sikap tidak menghormati perasaan, harapan, dan keinginan orang lain?

Karena suatu keputusan mengenai korupsi, memberantasnya atau tidak, mengikutinya atau menolak, membiarkannya atau menghalangi, bahkan peduli kepadanya atau tidak peduli, adalah sesungguhnya pilihan antara nilai-nilai, maka setiap pilihan tindakan etis yang posisif adalah tindakan yang bertanggung jawab, yaitu pertama-tama tanggung jawab orang yang bersangkutan kepada hati nuraninya. Kemudian, tanggung jawab kepada nurani itu adalah kelanjutan tanggung jawab kepada Tuhan. Sebab perbuatan baik manusia bukanlah “untuk kepentingan” Tuhan (sekalipun justru harus dilakukan demi Tuhan). Melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagaimana perbuatan jahatnya tidaklah akan merugikan Tuhan melainkan akan merugikan manusia bersangkutan sendiri. [❖]